**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Sistem informasi memainkan peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi karena semakin tingginya kemampuan teknologi komputer dan telah menghasilkan jaringan komunikasi yang kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jaringan-jaringan ini telah mentransformasikan ketajaman dan bentuk aktivitas organisasi, menciptakan fondasi untuk memasuki era digital.

Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) merupakan salah satu bentuk dari implementasi e-Government oleh pemerintah melalui sistem informasi berbasis komputer. Dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) membuat segala jenis urusan pelayanan administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif dan akurat. Kegiatannya dimulai dari kenaikan pangkat, mutasi pegawai, penyusunan daftar urut kepangkatan, dan pensiunan pegawai. Sistem informasi berbasis komputer ini pun membatu pelayanan dalam mengelola informasi data kepegawaian dan dapat menyajikan data informasi yang valid, integrase dan mutakhir.

Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Tujuan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung menerapkan program tersebut untuk memberikan pelayanan informasi kepegawaian yang valid, transparan dan profesional kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, dan juga menganggap program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai suatu wadah bagi aparatur yang ingin mengetahui informasi-informasi kepegawaian dalam satu sistem.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung banyak memiliki manfaat dan kegunaannya, salah satunya yaitu dalam pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga pegawai dalam mencari informasi yang dibutuhkan bisa menjadi lebih efektif dan efesien dengan membuka aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian yang telah tersedia. Akan tetapi aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini, memiliki kekurangan yaitu kurangnya sistem keamanan sehingga rentan di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan adanya informasi tersebut.

Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, diduga bahwa kualitas pelayanan administrasi kepegawaian masih rendah, hal ini terlihat dari masalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, berkaitan dengan tanggung jawab pegawai yang memegang wewenang pembuatan serta penyimpanan data-data pegawai di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Contohnya, seperti kasus baru baru ini di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung terjadi suatu kasus bahwa salah satu pegawai Sub bagian kepegawaian yang memiliki wewenang pembuatan dan penyimpanan data pada program aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian telah tertipu oleh salah satu penelepon yang mengaku salah satu anggota pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera mengirimkan data salah satu pegawai dikarenakan untuk syarat kenaikan pangkat. Setelah data disiapkan dan dikirimkan, beberapa hari kemudian salah satu pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dikirimkan informasi data-datanya terkena penipuan jutaan rupiah dikarenakan adanya kelengkapan data pegawai tersebut sehingga mempermudah jalannya penipuan.
2. Ketepatan waktu pelayanan, berkaitan dengan kecepatan proses pemberian pelayanan yang dibutuhkan oleh pegawai-pegawai. Contohnya, pelayanan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung kurang cepat dalam memberikan data-data pegawai, dikarenakan pada bagian kepegawaian telat dalam mengupdate data-data terbaru pegawai. Sehingga ketika data tersebut di butuhkan, bagian kepegawaian harus mendata ulang kembali keseluruhan pegawai.

Berdasarkan inidkator diatas, masalah yang timbul dari Sistem Informasi Manajemen yang kurang di dasarkan pada masalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagai berikut :

1. Penggunaan (*use*), contohnya masih banyak pegawai di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang belum melengkapi data pribadinya kedalam sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dikarenakan jauhnya lokasi upt dari kantor pusat. Sehingga ketida data pegawai tersebut dibutuhkan akan lambat di proses karena data yang tidak lengkap.
2. Dampak individu (*individual impact*), merebaknya kejahatan teknologi seperti pelanggaran hak cipta/pembajakan, *cybercrime* (kejahatan maya). Contohnya, pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung terdapat salah satu pegawai yang terkena penipuan jutaan rupiah dikarenakan bocornya informasi data pegawai, sehingga mempermudah proses jalur penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Sistem Informasi Manajamen Kepegawaian Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung”.**

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan perihal yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung?
   1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
      1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
3. Untuk mengetahuui, mengkaji, dan menganalisis penanggulangan dari hambatan-hambatan pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan konstekstual dan konseptual, serta kegunaan praktis untuk perbaikan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Umumnya bagi pengembangan ilmu administrasi negara, pada khususnya mengenai pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

1. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah pengaruh sistem informasi manajemen kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.